

PELAKSANAAN UN DI SUMATERA BARAT: PERSEPSI DAN HARAPAN

Tri Kurniawati

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract

Indonesian government especially ministry of education conduct a policy called national test for the students as one way to improve the educational quality. But this policy get many arguments from stakeholders such as teachers, student, parents dan society. The aim of this research is to describe the perception and expectation of teachers in West Sumatera related to national test administration. As the results the teachers' perception shows that national test administration in West Sumatera was relevant to the curriculum and be able to control the educational quality. But they also hope that in future the fund will be reported and managed transparently. Based on this research, we recommend the government to improve teachers' quality, and control the national test administration to avoid fraudulent.

Kata Kunci: Ujian Nasional, Persepsi, dan Harapan

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Barat merupakan persoalan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Banyaknya perdebatan yang muncul sejak kebijakan Ujian Nasional (UN) digulirkan seperti sistem yang tidak tepat, sosialisasi yang minim, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan sebagainya merupakan indikasi telah terjadinya celah gap (disparitas) persoalan yang belum dipahami oleh komponen pendidikan tentang pelaksanaan UN tersebut.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana memposisikan pelaksanaan UN yang ideal dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan model evaluasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat. Model tersebut

menghasilkan serangkaian tindakan yang secara optimal berimbang dan dapat membantu pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Tujuan pelaksanaan UN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, mutu pendidikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Disamping itu UN juga memiliki fungsi sebagai pemetaan mutu pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentu kelulusan peserta didik serta pertimbangan untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.

Target nilai kelulusan setiap tahunnya juga relatif meningkat. Pada tahun 2005 nilai minimal untuk mata pelajaran yang di UN kan adalah 4,25 dengan rata-rata minimal juga

4,25. Sedangkan untuk tahun 2014 nilai minimal adalah 4,00 dan nilai rata-rata minimal adalah 5,50. Peningkatan target nilai kelulusan setiap tahun juga berdampak pada target kelulusan di masing-masing sekolah. Dengan meningkatnya target nilai kelulusan, setiap sekolah sangat berhati-hati dalam pencapaian target kelulusan siswanya. Standar kelulusan yang meningkat setiap tahun juga memaksa siswa untuk menghafal soal-soal yang kemungkinan keluar.

Hal senada juga terlihat dari pandangan guru terhadap pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan. Hal ini dianggap telah merampas hak guru seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 bahwa evaluasi belajar dilakukan oleh guru untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesimbangan. UN membuat peran guru dalam memantau proses belajar selama 3 tahun tidak terlalu berarti untuk menentukan evaluasi belajar akhir siswa.

Perlu diingat bahwa pendidikan kita bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Artinya, pendidikan harus mampu mencetak manusia yang memiliki kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi pendidikan kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga sikap dan

keterampilan. Untuk mengukur sikap dan keterampilan ini lebih baik bila dilakukan oleh guru yang mengajar siswa tersebut.

Bila dilihat dari segi dana, jalur anggaran yang dikeluarkan APBN untuk penyelenggaraan UN belum diberitakan dengan jelas, sehingga kemungkinan korupsi masih terbuka lebar. Belum lagi dana yang tidak terduga yang harus dikeluarkan siswa. Siswa mungkin dibebaskan dari biaya untuk mengikuti UN, tapi karena distribusi dana ujian belum jelas, tetap sekolah bisa saja membebaskan biaya ujian kepada siswa.

Berdasarkan kajian koalisi pendidikan (Tempo, 4 Februari 2005), terdapat 4 aspek penyimpangan yang terjadi. Pertama, dari aspek pedagogis. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Tapi yang dinilai dalam UN hanya satu aspek kemampuan saja yaitu kognitif, sedangkan kedua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan.

Kedua, aspek yuridis. Beberapa pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah dilanggar, misalnya pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UN hanya mengukur

kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kenyataannya, selain merampas hak guru untuk melakukan penilaian, UN juga mengabaikan unsur penilaian berupa proses. Selain itu, pada pasal 59 ayat 1 dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tapi dalam UN pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang sebenarnya merupakan tugas pendidik.

Ketiga, aspek sosial dan psikologis. Dalam mekanisme UN yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005. Ini menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan diujikan di sekolah ataupun di rumah.

Keempat, aspek ekonomi. Secara ekonomis, pelaksanaan UN memboroskan biaya. Tahun 2005, dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp 260 miliar, belum ditambah dana dari APBD dan masyarakat. Memang disebutkan pendanaan UN berasal

dari pemerintah, tapi tidak jelas sumbernya, sehingga sangat memungkinkan masyarakat kembali akan dibebani biaya. Selain itu, belum dibuat sistem yang jelas untuk menangkal penyimpangan finansial dana UN. Pada tingkatan sekolah, tidak jelas bagaimana sistem penghitungan dan distribusi dana ujian (baik APBN maupun APBD). Posisi sekolah hanya tinggal menerima alokasi yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara di atasnya.

Berbagai data pendukung dan fenomena yang dipaparkan yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan penyelenggaraan UN karena belum mampu menjalankan fungsi seperti yang digariskan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini merupakan salah satu terobosan yang mengkaji bagaimana persepsi dan harapan *stakeholder* diantaranya siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua tentang pelaksanaan UN di Sumatera Barat. Namun pada artikel kali ini pembahasan akan dibatasi pada persepsi dan harapan guru sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif. Dengan kajian semacam ini dapat diketahui aspek-aspek pelaksanaan UN yang telah sesuai dengan harapan, aspek yang harus menjadi prioritas utama bahkan juga prioritas rendah untuk diperbaiki serta aspek mana yang ternyata mendapat perlakuan berlebihan. Dengan rangkaian riset ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi riil dan harapan *stakeholder*

tentang formula yang tepat dan ideal bagi pelaksanaan UN yang sesuai dengan kebutuhan lokal propinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Branen (1993) menyatakan bahwa penggabungan kedua metode tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah guru semua sekolah yang melaksanakan UN di propinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara bertahap. Tahap 1 pengambilan sampel dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yaitu : Dharmasraya, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sawahlunto Sijunjung, Lima Puluh Kota, Solok, Agam, Padang Pariaman, Mentawai, Solok Selatan dan Tanah Datar, sedangkan kota terdiri dari: Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto dan Solok. Menurut Irawan (1999), sampel dapat diambil 25% sampai 30%. Sesuai dengan pendapat tersebut kabupaten dan kota yang akan diambil sebagai sampel ditetapkan sebanyak 25% dengan

menggunakan teknik *random sampling*. Kabupaten dan kota yang terpilih adalah: Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Padang.

Tahap 2 adalah pengambilan sampel sekolah untuk semua jenjang pendidikan dan semua klasifikasi jurusan yang ada di sekolah, di kabupaten dan kota yang terpilih dan dibedakan atas *target population* (populasi sasaran) dan *accessible population* (populasi yang dapat diperoleh). Populasi sasaran didefinisikan sebagai totalitas grup dari responden-responden yang dijadikan sasaran penelitian. Kemudian populasi yang dapat diperoleh didefinisikan sebagai populasi yang tersedia saat penelitian dilaksanakan dan memungkinkan untuk dijadikan populasi. (Kumaidi,1989)

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane (dalam Rachmat,1985:112) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
D = *Sampling error* (0,10)

Berdasarkan rumus di atas ditentukan jumlah sampel sekolah adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1272}{1272(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 93 \text{ sekolah}$$

Tabel 1. Populasi dan Sampel Sekolah

No	Jenis Sekolah	Jumlah Populasi (Sekolah)	Jumlah Sampel
1	SMP/MTs	886	65
2	SMA/MA	238	17
3	SMK	148	11
	Jumlah	1272	93

Sumber : LPMP Tahun 2007

Tahap 3. Setelah didapatkan jumlah sampel sekolah, ditentukan jumlah responden (guru) dengan menggunakan teknik *random sampling* Krecjie (dalam Donal, 1982). Penelitian ini dilakukan terhadap semua jenis sekolah yang ada di kabupaten dan kota yang terpilih. Perbandingan jumlah sampel sekolah dengan jumlah populasi sekolah adalah 93:1272.

Pengumpulan data primer berupa kuesioner yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap dokumen yang ada baik pada tingkat propinsi, nasional dan lainnya. Kuesioner ini memiliki dua bagian yaitu persepsi dan harapan dengan item pertanyaan yang sama. Reponden akan menjawab bagian persepsi sesuai dengan pandangannya dan bagian harapan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Model matriks pengembangan instrumen untuk menguji persepsi dan harapan dari guru terhadap pelaksanaan UN di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Persepsi dan Harapan Guru

No	Responden	Persepsi dan Harapan UN		
		Persiapan	Pelaksanaan	Hasil
1.	Guru	Sistem UN dan sosialisasi	Proses pelaksanaan dan penyimpangan yang terjadi pada UN	Target kelulusan, sekolah, daerah, dan propinsi di ditingkat nasional

Tabel 3. Pertanyaan tentang Persepsi dan Harapan Guru

No	Pernyataan
1.	Punya perencanaan yang matang
2.	Disosialisasikan sebelumnya
3.	Mengukur kompetensi dasar bagi siswa
4.	Merupakan upaya untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia
5.	Merupakan upaya untuk pemerataan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia
6.	Sebagai pengakuan prestasi belajar siswa
7.	Peningkatan kualitas kurikulum
8.	Mengacu pada kurikulum sekolah
9.	Mengacu pada kepentingan Sumatera Barat
10.	Mencakup materi yang diajarkan guru
11.	Relevan dengan kurikulum KBK
12.	Relevan dengan kurikulum KTSP
13.	Pengulangan soal-soal tahun-tahun sebelumnya
14.	Jawaban mudah ditebak
15.	Standar kelulusan di atas rata-rata kemampuan masyarakat Sumatera Barat
16.	Mata pelajaran selain UN tidak diujikan juga secara nasional
17.	Menimbulkan kecemasan bagi saya
18.	Membuat saya rajin belajar (siswa)/mengajar (guru)

No	Pernyataan
19.	Mengharuskan siswa mengikuti les di sekolah
20.	Mengharuskan siswa mengikuti bimbingan belajar di luar jam sekolah
21.	Distribusi soal rawan kebocoran
22.	Alokasi waktu sangat sedikit
23.	Peraturan sangat ketat
24.	Fasilitas tempat ujian di luar sekolah kurang memadai
25.	Fasilitas tempat ujian layak
26.	Kunci jawaban dibocorkan oleh pengawas
27.	Kunci jawaban dibocorkan oleh teman satu sekolah
28.	Kunci jawaban dibocorkan oleh tim independen
29.	Kunci jawaban dibocorkan oleh kepala sekolah
30.	Kunci jawaban dibocorkan oleh guru
31.	Kunci jawaban dibocorkan oleh orang lain
32.	Penilaian UN menekankan perilaku adil
33.	Penilaian UN terbuka bagi siswa
34.	Penilaian UN diskriminatif terhadap siswa
35.	Penilaian UN tertutup untuk peserta
36.	Pengawas UN berasal dari sekolah
37.	Pengawas UN sistem silang guru
38.	Pengawas UN terdiri dari guru, kepek, tim independen dan polisi
39.	Pengawas UN melakukan kecurangan
40.	Terjadi kerjasama antar guru agar siswa mudah menyontek
41.	Guru memberikan jawaban pada siswa
42.	Pengawas memberikan jawaban pada siswa
43.	Memerlukan biaya yang banyak
44.	Memerlukan biaya peralatan yang banyak
45.	Perlengkapan ujian tidak disediakan
46.	Memiliki peralatan penunjang yang baik
47.	Pembagian dana ujian jelas
48.	Pembagian dana ujian tidak cukup
49.	Upah pengawas / pemeriksa memadai
50.	Biaya UN di Sumatera Barat sangat ekonomis
51.	Peserta UN bebas biaya
52.	Ada tim untuk membetulkan jawaban siswa
53.	Terjadi <i>mark up</i> (menaikkan nilai) hasil ujian
54.	Pelaksanaan UN belum terkoordinir dengan baik.
55.	UN mewakili kemampuan peserta didik.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Untuk menganalisis gap antara persepsi dan harapan guru di sekolah-sekolah di Sumatera Barat tentang pelaksanaan UN digunakan diagram Kartesius. Pada diagram ini setiap butir instrumen ditempatkan pada empat

bagian Kartesius, sehingga dapat diketahui butir-butir mana yang berada di tiap bagian. Langkah untuk mengisi diagram dilakukan seperti di bawah ini: 1) Menjumlahkan nilai harapan (Y) setiap item jawaban responden, kemudian menghitung nilai rata-ratanya, 2) Menjumlahkan nilai persepsi (X) setiap item jawaban responden, kemudian menghitung nilai rata-ratanya, 3) Menghitung rata-rata dari

rata-rata harapan (Y) seluruh responden, 4) Menghitung rata-rata dari rata-rata persepsi (X) seluruh responden, 5) Membuat diagram dengan menggunakan X, Y (absis dan ordinat), 6) Memasukkan hasil rata-rata (X, Y) tiap item pada diagram.

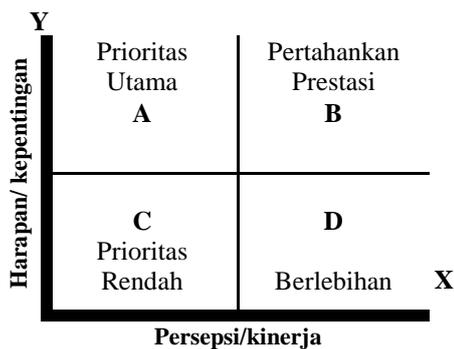


Diagram 1. Diagram Kartesius

Hasil analisis ini akan didapat daerah pertama (A) disebut dengan daerah prioritas utama yang harus dibenahi karena harapan tinggi sedangkan persepsi rendah. Daerah kedua (B) disebut dengan daerah yang harus dipertahankan, karena harapan tinggi dan persepsi juga tinggi. Daerah ketiga (C) disebut sebagai prioritas rendah, karena harapan rendah dan persepsi rendah, sedangkan daerah keempat (D) dikategorikan sebagai daerah berlebihan, karena harapan rendah dan persepsi tinggi, jadi bukan menjadi prioritas untuk dibenahi.

HASIL PENELITIAN

Jumlah guru sebagai responden dalam penelitian ini yang tersebar pada lima kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Responden Guru di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	%
1	Kab 50 Kota	56	15
2	Kab Agam	94	25
3	Kab Solok	72	20
4	Kota Padang	104	28
5	Kota Bukittinggi	44	12
	Total	370	100

Sumber : Data olahan 2007

Persepsi dan Harapan Guru tentang Pelaksanaan UN di Sumatera Barat

Persepsi guru tentang pelaksanaan UN memperlihatkan bahwa pelaksanaan UN telah relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah serta merupakan upaya untuk pemerataan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Harapan guru untuk pelaksanaan UN dimasa yang akan datang hendaknya transparansi dana ujian yang jelas dan siswa dibebaskan dari biaya ujian.

Persepsi dan Ekspektasi Guru di Kabupaten 50 Kota

Dari hasil nilai yang diberikan responden terhadap isian kuesioner di kabupaten 50 kota dapat dilihat pada gambar 2. Secara umum dapat dijelaskan bahwa guru-guru di Kabupaten 50 Kota berpersepsi bahwa pelaksanaan UN merupakan upaya untuk pemerataan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, peningkatan kualitas kurikulum dan telah mengacu pada kurikulum di sekolah. Pelaksanaan ujian pun menurut persepsi guru sudah baik artinya di Kabupaten 50 Kota tidak terjadi kerjasama guru dan

siswa dalam ujian, guru dan pengawas tidak akan memberikan bocoran jawaban kepada siswa tertentu.

Harapan guru di Kabupaten 50 Kota yaitu agar pelaksanaan UN terlaksana secara kondusif, diharapkan pada Dinas pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru bidang studi khususnya bidang studi yang diujikan, menambah fasilitas buku penunjang, dan buku paket, fasilitas tempat ujian perlu dibenahi dan sosialisasi sebelum pelaksanaan UN. Guru juga menyatakan membutuhkan pedoman tata cara pelaksanaan UN secara lengkap dan materi soal dalam UN sesuai dengan yang diajarkan pada siswa. Selain itu, guru juga mengakui ada penambahan jam mengajar yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan UN.

sebenarnya tidak perlu menjadi perhatian besar (C) dan 4 item yang diperhatikan secara berlebihan (D). Artinya Dinas Pendidikan Kab. 50 kota menurut guru-guru dan kepala sekolah hendaknya memberikan perhatian serius tentang alokasi waktu, peraturan, fasilitas tempat ujian di luar sekolah dan perlengkapan ujian, sedangkan keberadaan tim pengawas independen seharusnya tidak mendapat perhatian berlebihan.

Persepsi dan Harapan Responden di Kabupaten Solok

Hasil penilaian yang diberikan responden terhadap isian kuesioner di Kabupaten Solok dapat dilihat pada diagram 2. Dari diagram ini dapat dijelaskan bahwa menurut persepsi guru, penilaian UN telah menekankan perilaku adil, perencanaan yang matang dan telah disosialisasikan sebelumnya. Namun, alokasi waktu yang sangat sedikit, fasilitas tempat ujian di luar sekolah yang kurang memadai dan perlengkapan ujian yang tidak disediakan.

Harapan guru di Kabupaten Solok agar UN dapat terlaksana secara kondusif adalah Dinas Pendidikan hendaknya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru bidang studi khususnya bidang studi yang di-UN-kan. Kemudian juga dilakukan penambahan fasilitas buku penunjang, dan buku paket. Fasilitas tempat ujian juga perlu dibenahi dan sosialisasi sebelum pelaksanaan UN juga perlu dilakukan.

Harapan/Keperluan	A	B
	22, 23, 24, 45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 25, 33, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 53
	C	D
	14, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 55	13, 35, 46, 54
	Persepsi/kinerja	

Diagram 2. Persepsi dan Harapan Guru di Kab 50 Kota

Dari diagram dapat dilihat ada 4 item yang perlu dijadikan prioritas oleh Dinas Pendidikan Kab. 50 Kota (A), 25 item yang perlu dipertahankan (B), 21 item yang

Harapan/ Kepentingan	A	B
	19, 36, 38, 45, 49	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 32, 33, 37, 46, 47, 48, 50, 53
	C	D
	14, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 52	13, 23, 43, 54, 55

Persepsi/kinerja

Diagram 3. Persepsi dan Harapan Guru di Kab Solok

Dari diagram diatas terlihat ada 5 item yang perlu mendapat perhatian secara serius dari Dinas Pendidikan Kab. Solok (A), ada 25 item yang perlu dipertahankan (B), ada 19 item yang sebenarnya tidak perlu menjadi perhatian besar (C), dan 5 item yang diperhatikan secara berlebihan (D). Artinya guru-guru dan kepala sekolah mengharapkan Dinas Pendidikan Kab. Solok memberikan perhatian serius tentang kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa mengikuti les di sekolah. Perbaikan terhadap efektifitas pengawas baik yang berasal dari sekolah, tim independen dan kelengkapan fasilitas ujian, biaya pelaksanaan UN juga perlu diperhatikan.

Persepsi dan Harapan Responden di Kabupaten Agam

Dari hasil jawaban yang diberikan responden terhadap isian kuesioner Kabupaten Agam secara umum dapat dijelaskan bahwa guru-guru di Kabupaten Agam memiliki persepsi bahwa dana pelaksanaan UN telah

disosialisasikann sebelumnya. Namun, fasilitas pelaksanaan ujian masih kurang layak.

Guru juga merasa bahwa UN punya perencanaan yang matang, disosialisasikan sebelumnya, UN mengacu pada kepentingan Sumatera Barat dan seyogianya siswa perlu les di sekolah, meskipun ada penambahan jam mengajar yang harus dipersiapkan oleh guru untuk pelaksanaan UN.

Harapan/ Kepentingan	A	B
	16, 19, 24, 36, 45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 25, 32, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 53
	C	D
	14, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52	13, 23, 54, 55

Persepsi/kinerja

Diagram 3. Persepsi dan Harapan Guru di Kab Agam

Persepsi dan Harapan Responden di Kota Padang

Dari hasil jawaban yang diberikan responden terhadap isian kuesioner di Kota Padang secara umum dapat dijelaskan bahwa guru-guru di Kota Padang berpersepsi bahwa pelaksanaan UN telah disosialisasikann sebelumnya, mengukur kompetensi siswa dan punya perencanaan yang matang.

Dari diagram 4 dapat dilihat bahwa ada 7 item yang perlu mendapat perhatian secara serius dari pihak Dinas Pendidikan Kota Padang (A), 25 hal yang perlu dipertahankan

(B), 13 item yang sebenarnya tidak perlu menjadi perhatian besar (C), dan 8 item yang diperhatikan secara berlebihan (D).

Harapan/ Kepentingan	A	B
	16, 21, 26, 34, 39, 49, 51	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 32, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 50, 54
	C	D
	14, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 51, 52	13, 17, 22, 23, 24, 40, 53, 55
	Persepsi/kinerja	

Diagram 4. Persepsi dan Harapan Guru di Kota Padang

Persepsi dan Harapan Responden di Kota Bukittinggi

Dari jawaban responden terhadap isian kuesioner di Kota Bukittinggi secara umum dapat dijelaskan bahwa guru-guru di Kota Bukittinggi berpersepsi meskipun UN punya perencanaan yang matang dan disosialisasikan sebelumnya namun kebijakan UN telah membuat terbebannya siswa dan orang tua. Harapan guru dan kepala sekolah di Bukittinggi jika terjadi sistem silang tempat ujian maka pemerintah hendaknya memperhatikan sarana dan prasarana serta kelayakan tempat ujian tersebut.

Dari diagram kartesius kelihatan ada 6 item yang perlu mendapat perhatian secara serius dari pihak sekolah (A) 25 item yang perlu dipertahankan (B), 13 item yang sebenarnya tidak perlu menjadi perhatian

besar (C), dan 4 item yang diperhatikan secara berlebihan (D) yaitu peraturan yang terlalu ketat, penilaian UN tertutup untuk siswa dan tim independen yang belum profesional.

Harapan/ Kepentingan	A	B
	24, 25, 32, 36, 45, 49	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 33, 37, 38, 46, 47, 48, 50, 53
	C	D
	14, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 55	13, 23, 35, 54
	Persepsi/kinerja	

Diagram 5. Persepsi dan harapan guru di Kota Bukittinggi

PEMBAHASAN

Berdasarkan persepsi dan harapan yang dikemukakan oleh responden di Sumatera Barat terlihat pandangan dan harapan mereka terkait dengan pelaksanaan UN. Evaluasi bagi proses pembelajaran sebenarnya merupakan upaya untuk menilai kualitas pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Bastian (2006) bahwa ada tiga ukuran keberhasilan pendidikan yaitu: *head* atau kepala yang melambangkan kecerdasan, *hand* atau tangan yang melambangkan keterampilan, dan *heart* yang melambangkan akhlak atau moral. Ketiga aspek ini sejalan dengan tiga aspek yang dikemukakan Bloom yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor

(keterampilan). Proses evaluasi hendaknya mampu menjangkau ketiga aspek ini.

Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) melalui guru untuk mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada penggalan waktu yang telah diprogramkan. Hasilnya dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi guru dalam meneruskan, mengulang atau memberikan perbaikan baik secara klasikal maupun individual. Analisis atau pengamatan guru terhadap hasil pelaksanaan ujian tetap berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang tertuang pada kurikulum. Dari hasil analisis tersebut guru dapat mengevaluasi program pengajaran yang telah dilaksanakan dan membuat rencana pengajaran yang lebih efektif.

Dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis sampai tindak lanjut (perbaikan) maka guru sudah memiliki tugas yang lengkap. Disini guru berperan penting dalam melakukan proses evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator adalah 75%. Namun sekolah dan guru dapat menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-

rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran (BSNP 2006). Kriteria ketuntasan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan untuk mencapai kriteria ideal.

Evaluasi yang dilakukan guru dapat berupa evaluasi formatif, sumatif dan diagnostik secara berkesinambungan (Arikunto, 2004). Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotor dengan instrumen penilaian yang relevan. Output dari proses penilaian ini adalah nilai.

Nilai merupakan hasil pengamatan guru selama siswa tersebut ikut dalam proses belajar baik dari kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) maupun psikomotor (keterampilan). Nilai ini juga merupakan representasi dari ketuntasan belajar siswa. Bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diperlukan program remedial. Disini, guru menjalankan fungsi penilaian proses sekaligus penilaian hasil.

Ujian akhir adalah saringan terakhir dalam mengukur kemampuan siswa. Materi evaluasi akhir hendaklah merupakan keterpaduan dari seluruh materi yang diterima oleh siswa selama siswa tersebut belajar. Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi akhir yang dilakukan secara sentralistik dan nasional terhadap mata pelajaran yang termasuk kemampuan dasar bagi siswa.

Sedangkan bagi mata pelajaran lain yang tidak diberikan Ujian Nasional, evaluasi dilakukan dengan Ujian Sekolah. Standar dan proses Ujian Sekolah hendaklah setara dengan ujian nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan dan kekhasan sekolah dan daerah.

Jika dikaitkan dengan aspek pedagogis UN merupakan salah satu tahap pembelajaran yang menjalankan fungsi evaluasi atau penilaian. Artinya, UN tetap merupakan proses yang menyatu dengan komponen pembelajaran secara keseluruhan. Model pelaksanaan UN yang hendaknya memenuhi aspek pedagogis. Artinya, materi UN disusun sejalan dengan kurikulum yang berlaku dan materi yang diajarkan guru di sekolah. Soal-soal UN dibuat berdasarkan kisi-kisi yang jelas dan standar dan tidak merupakan pengulangan dari soal-soal sebelumnya agar dalam proses pembelajaran guru lebih berpedoman pada substansi kurikulum bukan pada soal-soal AN/UN.

Di sisi psikologis selama ini juga terjadi kesalahan persepsi oleh masyarakat dalam memaknai UN. Nilai UN di gambarkan sebagai prestasi siswa, sekolah, prestasi Diknas dan Pemko. Akibatnya, proses belajar mengajar menuntut siswa mencapai target kelulusan dan sekolah mendapat peringkat terbaik bukan pada terkuasainya kompetensi oleh siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dan komponen pendidikan di Sumatera Barat belum memahami makna evaluasi secara utuh.

Hasil evaluasi merupakan cerminan kualitas pembelajaran yang ujung tombaknya adalah guru. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana peningkatan profesi guru dan pembinaan pribadi guru baik secara materi maupun non materi. Pembinaan non materi dengan melibatkan *tungku tigo sajarangan* dan Departemen Agama, serta Departemen Pendidikan sehingga tercipta pemahaman oleh guru bahwa ia adalah tenaga profesional. Guru bukan sebagai pekerja sehingga terbina sikap dan pemahaman bahwa keberhasilan siswa adalah tolok ukur keberhasilan guru yang hasilnya punya nilai tersendiri serta sulit tergantikan dengan yang lain.

Sebagai proses evaluasi terhadap mutu pendidikan pada tiap satuan pendidikan, UN diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk melakukan perbaikan yang tentunya ditunjang dengan ketersediaan dana yang memadai. Sekolah dengan prestasi UN rendah kebanyakan berada di daerah. Sementara pemerintah menetapkan hasil UN sebagai dasar pemberian bantuan. Sekolah yang sering mendapatkan bantuan adalah sekolah yang memiliki nilai UN tinggi dan tingkat kelulusan yang tinggi pula. Dimasa yang akan datang disarankan kepada pemerintah agar peringkat UN tidak menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran dana pendidikan ke tiap satuan pendidikan yang ada.

PENUTUP

Secara umum persepsi guru tentang pelaksanaan UN di Sumatera Barat adalah telah relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah serta merupakan upaya untuk pemerataan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Harapan guru untuk pelaksanaan UN dimasa yang akan datang hendaknya transparansi dana ujian, siswa disekolah dibebaskan biaya terkait dengan pelaksanaan ujian serta kelengkapan fasilitas ujian.

Terkait dengan hasil penelitian ini ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan. Pertama, pemerintah perlu memikirkan bagaimana peningkatan profesi guru dan pembinaan pribadi guru baik secara materi maupun non materi. Pembinaan non materi dengan melibatkan *tungku tigo sajarangan* dan Departemen agama, sehingga profesionalitas guru dapat meningkat.

Kedua, hendaknya kepala dinas pendidikan propinsi/kota/kabupaten membuat surat edaran yang memberitahukan adanya dana UN dari pemerintah sehingga sekolah dilarang memungut biaya UN. Atau jika dana UN baru diterima setelah UN berakhir untuk mengantisipasi dibuat surat ke sekolah negeri dan swasta yang manajemen sekolahnya sudah baik untuk memasukkan dana UN pada rencana biaya belanja sekolah setiap awal tahun ajaran, sedangkan bagi sekolah yang manajemen sekolahnya belum baik dapat menarik dana dari siswanya

melalui komite sekolah tetap berpegang hasil urung rembug dengan orangtua dan siswa.

Ketiga, terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam pelaksanaan UN, mengindikasikan secara yuridis sistem pengawasan kita masih lemah baik dari persiapan, proses pelaksanaan serta aturan dan tata tertib dalam penyelenggaraan UN. Untuk mencegah bocornya kunci jawaban, mencegah timbulnya *habitual cheating* dikalangan pelajar, pemerintah perlu membuat SOP yang jelas mulai dari penyiapan dan penerimaan soal, biaya yang transparan, pedoman penyelenggaraan UN yang standar lengkap dengan sanksi yang tegas terhadap kecurangan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Chua, Clare. 2004. *Perception of Quality in Higher Education*. Canberra: Proceedings of the Australian Universities Quality Forum.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun*

- 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Donal, A. 1982. *Pengantar Penelitian*. terjemahan Arief Furcan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gronlund, N. E. 1985. *Constructing Achievement Test: Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hamalik, Oemar. 2004. *Perencanaan Pengajaran berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA LAN.
- Koalisi Pendidikan pada 4 November 2004, Tempo.
- Kumaidi. 1989. *Diktat Statistik*, FPTK 11, IP Padang.
- Ngadirin. 2004. *UN Sebagai Issue Kritis Pendidikan*. Jakarta: Jurnal Pendidikan.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., dan Berry, L. L., 1985. *A Conceptual Model of Service Quality and its Implication Consumer Perception of Service Quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-37.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2005 sebagai dasar Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatUN Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan.
- Rachmat, O. 1993. *Kepuasan Pelanggan sebagai Keunggulan Daya Saing*. *Jurnal Manajemen Prasetya Mulya*. Jilid 1 No. 1.
- Simpson, Blair Jones. 1954. *Educational Psychology*. New York: MacMillan.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka.
- Suderadjat, Heri. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pembaharuan Pendidikan dalam UU Sisdiknas 2003*. Bandung: CV. Cipta Cemas Grafika.
- Sudijono, Anas. 2003. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syaodih, Nana. 1997. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wita, Dwi. *UN Kontradiktif*. Diakses dari <http://google.com>. Diakses tanggal 28 April 2007.